

**ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR PARIWISATA
PADA BEBERAPA KABUPATEN DI PROVINSI
JAWA BARAT TAHUN 2012-2016**

NOVI RIZKA AMALIA

Email : novirizka56@gmail.com

Jurusan Ilmu Ekonomi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

INTISARI

Salah satu usaha untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah melalui optimalisasi potensi dalam sektor pariwisata. Sektor pariwisata memiliki kontribusi yang turut andil dalam pembangunan daerah, serta sebagai rangsangan untuk meningkatkan pembangunan pada sektor lain secara berkala. Pendapatan daerah dan industri pariwisata berkaitan dan berjalan melalui jalur PAD dan bagi hasil pajak/bukan pajak. Provinsi Jawa Barat memiliki potensi pariwisata yang cukup baik dan mendapat perhatian untuk terus dikembangkan, terlihat dari jumlah PAD yang selalu mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Hal tersebut yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pendapatan daerah dari sektor pariwisata yang bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata pada beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data panel selama 5 tahun (2012-2016). Analisis data dengan menggunakan metode *Pooled Least Square* dan *Fixed Effect Model*. Variabel dalam penelitian ini adalah jumlah wisatawan, jumlah restoran dan rumah makan, jumlah kamar hotel, jumlah kendaraan bermotor umum, dan PDRB. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah wisatawan dan jumlah kamar hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata, sedangkan variabel jumlah restoran dan rumah makan, jumlah kendaraan bermotor umum, dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata dengan angka probabilitas.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Pariwisata, *Pooled Least Square*, *Fixed Effect Model*.

ABSTRACT

One of the efforts to increase region's revenue is through the optimization of potential in the tourism sector. The tourism sector has a contribution that contributes to regional development, as well as a stimulus to increase development in other sectors on a regular basis. Regional revenue and tourism industry are related and running through PAD channels and tax/non-tax revenue sharing. West Java Province has good tourism potential and attention to continue to be developed, seen from the amount of PAD which always increase in every year. This is what makes researchers interested to conduct research on regional revenue from the tourism sector that aims to analyze the factors that affect regions revenue from the tourism sector in some districts in West Java Province. The data used in this research is secondary data that is panel data for 5 years (2012-2016). Data analysis using Pooled Least Square method and Fixed Effect Model. The variables in this research are the number of tourists, the number of restaurants and food stalls, the number of hotel rooms, the number of public motor vehicles, and GRDP. Based on this research, it can be concluded that the variable of the number of tourists and the number of hotel rooms has no significant effect to the regions revenue from the tourism sector, while the variable of the number of restaurants and food stalls, the number of public motor vehicles, and GRDP have a significant effect on the regions revenue from the tourism sector with probability numbers.

Keywords: Regions Revenue, Tourism, Pooled Least Square, Fixed Effect Model.

Latar Belakang

Berkembangnya jumlah pemerintahan Kabupaten/Kota di Indonesia menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah pusat, DPR/DPRD maupun masyarakat. Pertanyaan yang mendasar adalah bagaimana pemda tersebut dapat menyelenggarakan aktivitas di wilayahnya, terutama bagi pemerintahan daerah yang baru. Penyelenggaraan aktivitas tersebut tentunya terkait erat dengan masalah anggaran pendapatan dan belanja daerahnya. Dengan kata lain, bagaimana suatu pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada, meningkatkan

pendapatan daerahnya, dan mengalokasikannya untuk kesejahteraan masyarakat (*Financial Statistics of Regency/Municipality Government 2014-2015*).

Pada pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 disebutkan bahwa “*Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa*”. Pemerintah daerah bisa menggunakan pasal tersebut untuk melaksanakan otonomi dengan wewenang yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Maksud dari otonomi tersebut yaitu otonomi daerah dimana kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat daerah masing-masing sesuai dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dari masyarakat berlandaskan dengan undang-undang yang berlaku.

Pelaksanaan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintah pusat dan daerah, yang dikenal sebagai otonomi daerah dengan azas dan sistem desentralisasi (Qodarrochman, 2010).

Berlakunya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 perihal Pemerintah Daerah serta Undang-undang No. 33 Tahun 2004 perihal Perimbangan Keuangan Pusat dan

Daerah, memberi kesempatan luas kepada pemerintah daerah guna mengatur sumber daya yang dipunya supaya mampu memberikan hasil yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat. Tiap-tiap pemerintah daerah berusaha untuk memajukan perekonomian daerahnya masing-masing termasuk dengan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, manajemen sumber-sumber PAD yang telah ada hendaknya dikembangkan. Disisi lain, pemerintah daerah seharusnya selalu berinovasi dan berkreasi untuk menggali serta mengembangkan potensi dari sumber-sumber PAD yang dipunya. Oleh karena itu, semakin banyaknya sumber-sumber PAD yang dipunya, maka wilayah tersebut akan semakin banyak mempunyai sumber pemasukan dimana nantinya dapat digunakan untuk pembangunan daerahnya.

Pembangunan pada dasarnya merupakan proses multidimensial yang meliputi perubahan struktur sosial, perubahan dalam sikap hidup masyarakat dan perubahan dalam kelembagaan (institusi) nasional. Pembangunan juga meliputi perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan, dan pemberantasan kemiskinan (Yuliadi, 2013).

Sektor pariwisata memiliki kontribusi yang menentukan dalam pembangunan daerah, serta sebagai penggerak untuk memajukan pembangunan pada sektor lain dengan berkala. Berhasilnya pengembangan sektor pariwisata artinya akan meningkatkan peranannya pada pendapatan daerah, yang mana pariwisata adalah salah satu komponen dalam peningkatannya (Saleh, 2003).

Semakin besarnya PAD maka wilayah itu akan semakin independen yang ditandai dengan ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat yang akan semakin berkurang. Tetapi faktanya, kebanyakan wilayah tersebut masih dihadapkan pada ketergantungan fiskal yang berupa subsidi dan bantuan dari pemerintah pusat, dikarenakan terbatasnya PAD yang dimilikinya. Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerahnya, salah satunya dapat diukur melalui kinerja/kemampuan keuangan daerah (Halim, 2004).

Salah satu usaha untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah melalui optimalisasi potensi dalam sektor pariwisata. Pendapatan daerah dan industri pariwisata berkaitan serta berjalan melalui jalur PAD dan bagi hasil pajak/bukan pajak. Menurut Tambunan yang dikutip oleh Badrudin (2001), mengemukakan bahwa industri pariwisata sebagai sumber PAD yaitu industri pariwisata kepunyaan masyarakat daerah (*Community Tourism Development* atau CTD). Melalui pengembangan CTD maka pemerintah daerah bisa mendapatkan kesempatan perolehan pajak serta berbagai retribusi resmi berasal dari aktivitas industri pariwisata yang bercirikan multisektoral, mencakup hotel, restoran, usaha wisata, usaha perjalanan wisata, *professional convention organizer*, pendidikan formal dan informal, pelatihan serta transportasi.

Sesuai dengan Undang-undang No. 11 Tahun 1950, Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang pertama kali dibentuk di Indonesia. Provinsi Jawa Barat terdiri atas 18 kabupaten dan 9 kota. Ibu kotanya adalah Bandung. Setiap

kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Barat memiliki potensi pariwisata yang cukup baik dan memberikan sumbangan bagi pendapatan daerahnya.

Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2015

Tahun	PAD	PAD Pariwisata
2011	8.502.643.155	7.747.222.617
2012	9.982.917.415	9.206.540.654
2013	12.360.109.870	11.299.800.791
2014	15.038.153.310	13.823.841.807
2015	15.837.707.187	14.690.475.715
Jumlah	61.721.530.937	56.767.881.584

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi, BPS

Dilihat dari tabel 1.2 bahwa pendapatan asli daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat selalu mengalami peningkatan disetiap tahunnya dengan jumlah sebesar Rp 61.721.530.937, sedangkan sumbangan pendapatan dari sektor pariwisata adalah sebesar Rp 56.767.881.584.

Kemudian jumlah kunjungan wisatawan juga berpengaruh didalam pendapatan daerah sektor pariwisata. Provinsi Jawa Barat juga termasuk salah satu daerah yang menjadi destinasi wisata, baik wisatawan domestik dan mancanegara yang berkunjung ke Provinsi Jawa Barat. Berikut adalah tabel jumlah kunjungan wisatawan di wilayah Provinsi Jawa Barat dari tahun 2011-2015.

Tabel 1.2 Jumlah Kunjungan Wisatawan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2015

Tahun	Wisatawan		Jumlah
	Domestik	Mancanegara	
2011	35.315.020	1.333.512	36.648.532
2012	42.758.063	1.905.378	44.663.441
2013	45.536.179	1.794.401	47.357.580
2014	47.992.088	1.962.639	49.954.727
2015	56.334.706	2.027.629	58.362.335

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan tabel 1.3 dapat dilihat bahwa jumlah wisatawan yang berkunjung ke wilayah Provinsi Jawa Barat selalu mengalami peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi pada tahun 2013 mengalami penurunan sebanyak 110.977 jiwa pada jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, yang pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2012 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tersebut sebesar 1.905.378 jiwa berkurang menjadi sebesar 1.794.401 jiwa.

Hal yang paling utama dalam membangun sistem ekonomi daerah agar mampu meningkatkan kemandirian daya saing salah satunya adalah melalui sektor pariwisata, yang diharapkan dapat memberikan andil yang baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Rumusan Masalah

1. Apakah variabel jumlah wisatawan dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah sektor pariwisata pada beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Barat?

2. Apakah variabel jumlah restoran dan rumah makan dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah sektor pariwisata pada beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Barat?
3. Apakah variabel jumlah kamar hotel dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah sektor pariwisata pada beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Barat?
4. Apakah variabel jumlah kendaraan bermotor umum dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah sektor pariwisata pada beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Barat?
5. Apakah variabel PDRB dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah sektor pariwisata pada beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Barat?

Tujuan Penelitian

Sejalan dengan latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh variabel jumlah wisatawan terhadap pendapatan asli daerah sektor pariwisata pada beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh variabel jumlah restoran dan rumah makan terhadap pendapatan asli daerah sektor pariwisata pada beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui pengaruh variabel jumlah kamar hotel terhadap pendapatan asli daerah sektor pariwisata pada beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Barat.

4. Untuk mengetahui pengaruh variabel jumlah kendaraan bermotor umum terhadap pendapatan asli daerah sektor pariwisata pada beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Barat.
5. Untuk mengetahui pengaruh variabel PDRB terhadap pendapatan asli daerah sektor pariwisata pada beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Barat.

Tinjauan Pustaka

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004, pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber didalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali didaerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Pendapatan daerah menjadi sebuah elemen yang amat menentukan berhasil atau tidak independensi pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka otonomi daerah pada masa ini. Sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu elemen yang amat dicermati untuk menentukan tingkat kemandirian suatu wilayah dalam rangka otonomi daerah (Saleh, 2003).

Klasifikasi PAD yang terbaru berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri atas: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah dengan undang-undang (Siagian, 1985). Pajak Daerah terdiri dari:

a. Pajak Provinsi, terdiri dari:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- 4) Pajak Air Permukaan
- 5) Pajak Rokok

b. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 7) Pajak Parkir

- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Yani, 2008). Retribusi untuk kabupaten/kota terdiri dari dua macam, yakni:

- 1) Retribusi untuk kabupaten/kota ditetapkan sesuai kewenangan masing-masing daerah, yang terdiri dari: 10 jenis retribusi jasa umum, 4 jenis retribusi perizinan tertentu.
- 2) Retribusi untuk kabupaten/kota ditetapkan sesuai jasa/pelayanan yang diberikan oleh masing-masing daerah, terdiri dari: 13 jenis retribusi jasa usaha (Kadjatmiko, 2002).

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasi jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup

bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau disebut BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara (BUMN) dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan pendapatan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga salah satu pendapatan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasi yang termasuk dalam pendapatan asli daerah meliputi beberapa hal, yaitu:

- a) Hak penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b) Jasa/Giro
- c) Pendapatan bunga
- d) Keuntungan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e) Komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai sebab dari penjualan, pengadaan barang maupun jasa oleh pemerintah daerah.

Pariwisata

Secara etimologi, kata pariwisata berasal dari bahasa sansekerta yaitu kata “pari” yang berarti banyak; berkali-kali; berputar-putar, dan kata “wisata” yang

bermakna perjalanan; bepergian. Pariwisata dalam bahasa Inggris adalah "tour" yang diartikan dalam kamus sebagai perjalanan atau bepergian untuk kesenangan mengunjungi berbagai tempat yang menarik, atau kunjungan singkat atau kunjungan lewat suatu tempat (Spillane J. J., 2002).

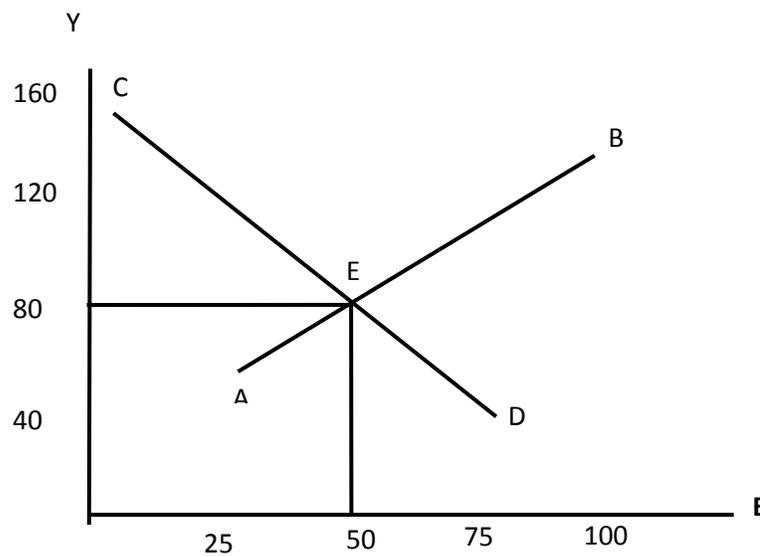
Ada banyak jenis pariwisata yang ditentukan menurut motif tujuan perjalanan, menurut James J. Spillane (1987: 28-31), pariwisata terdiri dari enam jenis yaitu:

- 1) Pariwisata Untuk Menikmati Perjalanan (*Pleasure Tourism*)
- 2) Pariwisata Untuk Rekreasi (*Recreation Tourism*)
- 3) Pariwisata Untuk Kebudayaan (*Cultural Tourism*)
- 4) Pariwisata Untuk Olah Raga (*Sports Tourism*)
- 5) Pariwisata Untuk Urusan Usaha Dagang (*Business Tourism*)
- 6) Pariwisata Untuk Berkonvensi (*Convention Tourism*)

Penawaran Pariwisata

Penawaran dalam pariwisata terdiri dari segala macam produk dan pelayanan/jasa yang dihasilkan oleh kelompok perusahaan industri pariwisata sebagai pemasok, yang ditawarkan baik kepada wisatawan yang datang secara langsung atau yang membeli melalui Agen Perjalanan (AP) atau Biro Perjalanan Wisata (BPW) sebagai perantara (Yoeti, 2008).

Dimana harga yang diinginkan konsumen (wisatawan akan terbentuk apabila tingkat harga yang diinginkan sama dengan jumlah kamar yang tersedia seperti yang ditunjukkan oleh titik E (equilibrium), yaitu titik perpotongan kurva permintaan AB dan CD, seperti tampak pada Gambar 2.1

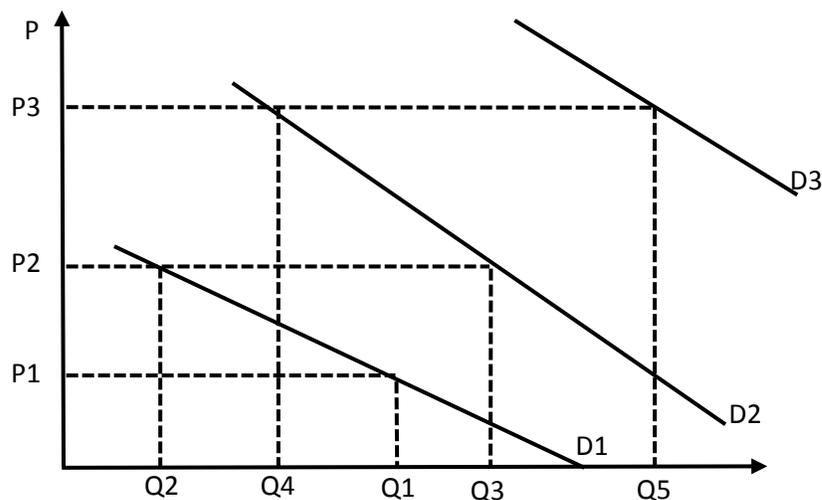


Gambar 2.1
Titik Equilibrium Permintaan Kamar Hotel
(dalam ribuan)
Sumber : (Yoeti, 2008)

Keseimbangan penawaran dan permintaan dikatakan stasioner dalam konteks bahwa sekali harga keseimbangan tercapai, biasanya cenderung untuk tetap dan tidak berubah selama permintaan dan penawaran tidak berubah. Dengan kata lain, apabila tidak terjadi pergeseran penawaran atau permintaan, maka tidak ada yang mempengaruhi harga akan mengalami perubahan.

Permintaan Pariwisata

Pariwisata dilihat sebagai suatu jenis usaha yang memiliki nilai ekonomi, maka pariwisata adalah sebagai suatu proses yang dapat menciptakan nilai tambahan terhadap barang dan jasa sebagai satu kesatuan produk yang nyata (*real goods*) ataupun yang berupa jasa-jasa (*service*) yang dihasilkan melalui proses produksi. Disisi lain, pariwisata dianggap seperti suatu jasa yang diminati (*preferend goods or service*), sebab lebih banyak dilakukan saat pendapatan meningkat. Ketika ada banyak keluarga yang menduduki kelompok pendapatan lebih tinggi, maka permintaan untuk berwisata akan meningkat lebih cepat dari pendapatan, dapat digambarkan dengan kurva permintaan individual Veblen seperti yang terlihat pada Gambar 2.2 (Lundberg, 1997)



Gambar 2.2 Kurva Permintaan Individual Veblen

Apabila harga yang ditetapkan adalah P1, maka produk yang terjual adalah Q1. Apabila harga ditingkatkan menjadi P2 menurut kurva D1, maka harga jumlah

barang yang dibeli akan turun menjadi Q2. Namun hal seperti ini tidak terjadi pada kurva Veblen, sebab konsumen mengerti pentingnya bagi produk tersebut dan kenyataannya konsumen justru akan membeli dalam jumlah yang banyak sebesar Q3. Oleh sebab itu, harga baru tersebut telah meningkatkan nilai kesenangan kualitas pelayanan atau pengalaman yang diberikan. Dalam hal ini, kurva permintaan bukan bergeser kebawah, akan tetapi bergeser ke D2 sebagai akibat dari pengaruh permintaan Veblen. Penurunan harga justru hanya akan meningkatkan sedikit jumlah barang yang dibeli, dimana pengaruhnya hanya menurut kurva permintaan baru D2. Ketika dinaikkan lagi menjadi P3, maka harga akan bergeser lagi, namun tindakan ini tidaklah membuat kurva permintaan mengalami penurunan menjadi Q4, akan tetapi justru terjadi peningkatan permintaan menjadi Q5.

Peranan Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Daerah

Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah yaitu dengan mengoptimalkan potensi dalam sektor pariwisata. Hubungan industri pariwisata dengan penerimaan daerah berjalan melalui jalur PAD dan bagi hasil pajak/bukan pajak. Menurut Tambunan yang dikutip oleh Badrudin (2001), bahwa industri pariwisata yang menjadi sumber PAD adalah industri pariwisata milik masyarakat daerah (Community Tourism Development atau CTD). Dengan mengembangkan CTD pemerintah daerah dapat memperoleh peluang penerimaan pajak dan beragam retribusi resmi dari kegiatan industri pariwisata yang bersifat multisektoral, yang

meliputi hotel, restoran, usaha wisata, usaha perjalanan wisata, profesional convention organizer, pendidikan formal dan informal, pelatihan dan transportasi.

Semakin lama wisatawan tinggal di suatu daerah tujuan wisata, maka akan semakin banyak pula uang yang dibelanjakan di daerah tersebut, setidaknya untuk keperluan makan, minum dan penginapan selama tinggal disana. Segala macam kebutuhan wisatawan selama perjalanan wisatanya akan menimbulkan gejala konsumtif untuk produk-produk yang ada di daerah tujuan wisata. Dengan adanya kegiatan konsumtif baik dari wisatawan mancanegara maupun domestik, maka akan memperbesar pendapatan dari sektor pariwisata suatu daerah (Austriana, 2005).

Belanja wisatawan di daerah tujuan wisatanya akan meningkatkan pendapatan dan pemerataan pada masyarakat setempat secara langsung maupun tidak langsung melalui dampak berganda (*multiplier effect*) (Spillane J. J., 1987). Dimana pada daerah tersebut berkesempatan untuk menambah pendapatannya, dengan cara menjual barang dan jasa, seperti restoran, hotel, pramuwisata dan barang-barang souvenir. Oleh sebab itu, semakin tingginya arus kunjungan wisatawan ke Provinsi Jawa Barat, maka pendapatan sektor pariwisata seluruh Provinsi Jawa Barat akan semakin meningkat pula.

Metode Penelitian

Objek Penelitian yang digunakan adalah meliputi 10 Kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat, yaitu: Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung

Barat, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Karawang. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, meliputi data pendapatan asli daerah sektor pariwisata sebagai variabel dependen, sedangkan untuk variabel independen dalam penelitian ini adalah data jumlah wisatawan, jumlah restoran dan rumah makan, jumlah kamar hotel, jumlah kendaraan bermotor umum, dan PDRB. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah dengan melakukan pencatatan secara langsung, atau dengan metode *library research* atau kepustakaan yaitu penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan berupa tulisan ilmiah, artikel, jurnal, serta laporan penelitian yang berhubungan dengan topik penelitian.

Metode Analisis

Untuk menganalisis data pada penelitian ini, penulis memilih metode analisis regresi data panel. Data panel (*pooled data*) didapatkan dengan cara menggabungkan data *time series* dengan *cross section*. Analisis regresi menggunakan data panel (*pooled data*) memungkinkan peneliti untuk mengetahui karakteristik antar waktu dan antar individu dalam variabel yang mungkin saja berbeda-beda. Analisis regresi data panel diaplikasikan untuk membuktikan seberapa jauh pengaruh variabel-variabel bebas yang digunakan untuk meneliti pendapatan asli daerah sektor pariwisata antar 10 Kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah didalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Model regresi yang baik adalah model yang apabila tidak terjadi homokedastisitas atau yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Gejala heteroskedastisitas lebih sering terjadi pada data *cross section* (Ghozali, 2001).

Uji Multikolinearitas

Tujuan uji multikolinearitas adalah untuk menguji apakah pada regresi tersebut terdapat adanya korelasi. Jika terjadi multikolinearitas, maka koefisien regresi dari variabel bebas akan tidak signifikan dan memiliki *standard error* yang tinggi. Semakin kecil korelasi antar variabel bebas, maka model regresi akan semakin baik (Santoso, 2005).

Uji Chow

Uji chow adalah pengujian untuk menetapkan model terbaik diantara *Fixed Effect Model* atau *Common/Pool Effect Model*. Apabila hasil mengatakan menerima hipotesis nol, maka model terbaik yang digunakan yaitu *Common Effect Model*. Namun, apabila hasil mengatakan menolak hipotesis nol, maka model terbaik yang digunakan yaitu *Fixed Effect Model*, dan pengujian akan dilanjutkan ke uji hausman.

Uji Hausman

Uji hausman adalah pengujian untuk menentukan penggunaan metode diantara *Random Effect* dan *Fixed Effect*. Apabila hasil dari uji hausman mengatakan menerima hipotesis nol, maka model terbaik yang digunakan yakni *Random Effect*. Namun, apabila hasil mengatakan menolak hipotesis nol, maka model yang terbaik yakni *Fixed Effect Model*.

Fixed Effect Model (FEM)

Pendekatan model ini memakai variabel boneka atau *dummy* yang dikenal dengan model efek tetap (*Fixed Effect*) atau *Least Square Dummy Variabel* atau disebut juga *Covariance Model*. Dalam metode *Fixed Effect* estimasi bisa dilaksanakan dengan tanpa pembobot (*no weight*) atau *Least Square Dummy Variabel* (LSDV) dan dengan pembobot (*cross section weight*) atau *General Least Square*. Pembobotan dilakukan untuk mengurangi heterogenitas antar unit *cross section* (Gujarati D. N., 1995). Penggunaan model ini cocok untuk melihat perilaku data dari masing-masing variabel sehingga data lebih dinamis dalam menginterpretasi data.

Uji Koefisien Determinasi (R-Square)

Koefisien determinasi R^2 pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen untuk mengukur kebaikan suatu model (*Goodness of Fit*). Nilai koefisien determinasi diantara 0 dan 1 ($0 < R^2 < 1$), nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam

menjelaskan variasi variabel independen sangat terbatas. Nilai yang mendeteksi 1 berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi model dependen (Gujarati, 2012).

Uji F-Statistik

Uji F-statistik ini dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen secara keseluruhan untuk bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengambilan keputusan dalam uji F dilakukan dengan membandingkan probabilitas pengaruh variabel independen secara simultan antara variabel dependen dengan nilai alpha yang digunakan, dalam penelitian ini penulis menggunakan alpha 0,05. Jika probabilitas variabel independen $> 0,05$, maka secara hipotesis H_0 diterima, artinya variabel independen secara simultan (bersama-sama) tidak berpengaruh secara nyata terhadap variabel dependen. Jika probabilitas variabel independen $< 0,05$, maka secara hipotesis H_0 ditolak atau menerima H_a , artinya variabel independen secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap variabel dependen.

Uji t-Statistik (Uji Parsial)

Uji t dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat dengan menganggap variabel bebas lainnya adalah konstan. Pengambilan keputusan dalam uji t dilakukan dengan membandingkan probabilitas variabel independen terhadap variabel dependen dengan nilai alpha yang digunakan, dalam penelitian ini penulis menggunakan alpha 0,05.

Hasil Analisis dan Pembahasan

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5.3 Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser

Variabel	Prob
Koefisien	0.3799
JW	0.7034
JRM	0.5894
JKH	0.4741
JKBU	0.2459
PDRB	0.8403

Keterangan: Variabel Dependen: Pendapatan Daerah Sektor Pariwisata

Sumber: data diolah

Dari tabel 5.1, maka bisa disimpulkan bahwa data yang digunakan sebagai variabel independen terbebas dari masalah heteroskedastisitas dengan nilai probabilitas $> 0,05$, maka data tersebut terbebas dari pelanggaran asumsi heteroskedastisitas. Yaitu dengan membandingkan nilai R-squared, F-statistik, dan prob (F-statistik) pada variabel dependen RESABS dengan variabel PDSP (*fixed effect unweighed*).

Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 5.4 Uji Multikolinearitas

	JW	JRM	JKH	JKBU	PDRB
JW	1.000000	0.334791	0.294191	0.213898	-0.081442
JRM	0.334791	1.000000	0.489072	0.497261	0.176542
JKH	0.294191	0.489072	1.000000	0.603105	0.118671
JKBU	0.213898	0.497261	0.603105	1.000000	0.482158
PDRB	-0.081442	0.176542	0.118671	0.482158	1.000000

Sumber: data diolah

Dari tabel 5.2 didapatkan informasi bahwa nilai koefisien korelasi antar variabel tidak lebih dari 0,9. Oleh karena itu, data pada penelitian ini tidak terjadi masalah multikolinearitas.

Analisis Model Terbaik

Tabel 5.5 Hasil Estimasi Jumlah Wisatawan, Jumlah Restoran dan Rumah Makan, Jumlah Kamar Hotel, Jumlah Kendaraan Bermotor Umum, dan PDRB terhadap Pendapatan Daerah Sektor Pariwisata pada Beberapa Kabupaten di Provinsi Jawa Barat

Variabel Dependen: Pendapatan Daerah Sektor Pariwisata	Model	
	Fixed Effect	Random Effect
Konstanta	-3.470823	-5.258271
Standar Error	1.140816	1.923238
Probabilitas	0.0039	0.0090
Jumlah Wisatawan	-0.003588	-0.028047
Standar Error	0.029968	0.019984
Probabilitas	0.9052	0.1675
Jumlah Restoran dan Rumah Makan	-0.202799	-0.095809
Standar Error	0.072039	0.081198
Probabilitas	0.0073	0.2444
Jumlah Kamar Hotel	0.008823	0.063178
Standar Error	0.069398	0.048410
Probabilitas	0.8994	0.1987
Jumlah Kendaraan Bermotor Umum	0.828892	0.161338
Standar Error	0.109817	0.095860
Probabilitas	0.0000	0.0994
PDRB	0.940605	1.315055
Standar Error	0.068587	0.123916
Probabilitas	0.0000	0.0000
R²	0.924338	0.786278
F_{statistik}	107.5066	32.37503
Probabilitas	0.000000	0.000000
Durbin Watson stat	0.780567	1.121386

Sumber: data diolah

Berdasarkan perbandingan uji pemilihan terbaik jadi model regresi yang digunakan dalam mengestimasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu menggunakan *Fixed Effect Model*.

Hasil Uji Chow

Tabel 5.6 Hasil Uji Chow Test

Effect Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	25.793132	(9,35)	0.0000
Cross-section Chi-square	101.620901	9	0.0000

Sumber: data diolah

Berdasarkan hasil uji chow tersebut, nilai probabilitas *Cross section F* dan *Chi square* adalah lebih kecil dari Alpha 0,05 yang artinya menolak uji hipotesis nol. Maka, menurut uji chow, model terbaik yang digunakan yakni dengan *Fixed Effect Model*. Dari hasil uji chow yang menolak hipotesis nol, maka pengujian data dilanjutkan pada uji hausman.

Hasil Uji Hausman

Tabel 5.7 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	18.208589	5	0.0027

Sumber: data diolah

Dari tabel uji hausman diatas, nilai cross-section random yaitu 0.0027 dimana angka tersebut lebih kecil dari Alpha 0,05 maka menolak hipotesis nol. Oleh karena

itu, untuk data yang digunakan dalam penelitian ini, *Fixed Effect Model* lebih sesuai untuk digunakan.

Hasil Estimasi Fixed Effect Model

Tabel 5.8 Hasil Estimasi Fixed Effect Model

Variabel Dependen: Pendapatan Daerah Sektor Pariwisata	Coefisient	t-Statistic	Prob
Konstanta	-3.470823	-3.042405	0.0039
JW	-0.003588	-0.119735	0.9052
JRM	-0.202799	-2.815127	0.0073
JKH	0.008823	0.127135	0.8994
JKBU	0.828892	7.547928	0.0000
PDRB	0.940605	13.71407	0.0000
R ² = 0.924338 F _{statistik} = 107.5066 Probabilitas = 0.000000			

Sumber: data diolah

Berdasarkan hasil estimasi tersebut, maka bisa dituliskan model analisis data panel terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan daerah sektor pariwisata pada beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Barat.

$$PDSP = \beta_0 + \beta_1JW + \beta_2JRM + \beta_3JKH + \beta_4JKBU + \beta_5PDRB + et$$

Keterangan:

PDSP = Pendapatan Daerah Sektor Pariwisata

JW = Jumlah Wisatawan

JRM = Jumlah Rumah Makan

JKH = Jumlah Kamar Hotel

JKBU = Jumlah Kendaraan Bermotor Umum

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto

β_0 = Konstanta

$\beta_1 - \beta_5$ = Koefisien Parameter

et = Disturbance Error

Dimana diperoleh hasil regresi sebagai berikut:

$$PDSP = \beta_0 + \beta_1JW + \beta_2JRM + \beta_3JKH + \beta_4JKBU + \beta_5PDRB + et$$

$$PDSP = -3.470823 - 0.003588 - 0.202799 + 0.008823 + 0.828892 + 0.940605 + et$$

β_0 = Nilai -3.470823 dapat diartikan bahwa apabila semua variabel independen (jumlah wisatawan, jumlah restoran dan rumah makan, jumlah kamar hotel, jumlah kendaraan bermotor umum, dan PDRB) dianggap konstan atau tidak mengalami perubahan maka pendapatan daerah sektor pariwisata akan meningkat sebesar 3.470 persen.

β_1 = Nilai -0.003588 dapat diartikan bahwa ketika jumlah wisatawan naik sebesar 1 persen, maka pendapatan daerah sektor pariwisata berkurang sebesar -0.003 persen.

β_2 = Nilai -0.202799 dapat diartikan bahwa ketika jumlah restoran dan rumah makan bertambah 1 persen, maka pendapatan daerah sektor pariwisata berkurang sebesar -0.202 persen.

β_3 = Nilai 0.008823 dapat diartikan bahwa ketika jumlah kamar hotel bertambah 1 persen, maka pendapatan daerah sektor pariwisata mengalami kenaikan sebesar 0.008 persen.

β_4 = Nilai 0.828892 dapat diartikan bahwa ketika jumlah kendaraan bermotor umum bertambah 1 persen, maka pendapatan daerah sektor pariwisata meningkat sebesar 0.828 persen.

β_5 = Nilai 0.940605 dapat diartikan bahwa ketika PDRB naik 1 persen, maka pendapatan daerah sektor pariwisata akan mengalami kenaikan sebesar 0.940 persen.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan tabel 5.6 olah data jumlah wisatawan, jumlah restoran dan rumah makan, jumlah kamar hotel, jumlah kendaraan bermotor umum, dan PDRB terhadap pendapatan daerah sektor pariwisata pada beberapa Kabupaten di Provinsi Jawa Barat periode tahun 2012-2016 diperoleh nilai R^2 sebesar 0.924338. Hasil ini menunjukkan bahwa secara statistik 92% dipengaruhi dalam penelitian ini dan sisanya sebesar 8% diluar penelitian.

Hasil Uji F

Dari tabel 5.6 olah data, diketahui nilai probabilitas F-statistik sebesar 0.000000 (signifikan pada 5%), yang artinya bahwa variabel independen yakni

jumlah wisatawan memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel dependen, selanjutnya variabel jumlah restoran dan rumah makan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel dependen, namun variabel jumlah kamar hotel memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel dependen, dan variabel jumlah kendaraan bermotor umum serta variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen yaitu pendapatan daerah sektor pariwisata pada beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Barat tahun 2012-2016.

Hasil Uji t

Berdasarkan tabel 5.6, maka dapat diidentifikasi masing-masing pengaruh variabel sebagai berikut:

a. Jumlah Wisatawan

Variabel jumlah wisatawan menunjukkan sebesar -0.119735 dengan tingkat signifikan 0.9052 yang artinya variabel jumlah wisatawan memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pendapatan daerah sektor pariwisata dengan taraf nyata atau alfa sebesar 5% atau $0,05$.

b. Jumlah Restoran dan Rumah Makan

Variabel jumlah restoran dan rumah makan menunjukkan sebesar -2.815127 dengan tingkat signifikan 0.0073 yang artinya variabel jumlah restoran dan rumah makan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan daerah sektor pariwisata dengan taraf nyata atau alfa sebesar 5% atau $0,05$.

c. Jumlah Kamar Hotel

Variabel jumlah kamar hotel menunjukkan sebesar 0.127135 dengan tingkat signifikan 0.8994 yang artinya variabel jumlah kamar hotel memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pendapatan daerah sektor pariwisata dengan taraf nyata atau alfa sebesar 5% atau 0,05.

d. Jumlah Kendaraan Bermotor Umum

Variabel jumlah kendaraan bermotor umum menunjukkan sebesar 7.547928 dengan tingkat signifikan 0.0000 yang artinya variabel jumlah kendaraan bermotor umum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan daerah sektor pariwisata dengan taraf nyata atau alfa sebesar 5% atau 0,05.

e. PDRB

Variabel PDRB menunjukkan sebesar 13.71407 dengan tingkat signifikan 0.0000 yang artinya variabel PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan daerah sektor pariwisata dengan taraf nyata atau alfa sebesar 5% atau 0,05.

Kesimpulan

1. Variabel jumlah wisatawan memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pendapatan daerah sektor pariwisata pada beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Semakin banyak atau meningkatnya jumlah wisatawan

yang berkunjung, maka seharusnya jumlah pendapatan daerah akan meningkat pula. Apabila jumlah wisatawan meningkat, artinya pendapatan daerah pada sektor pariwisata pun akan ikut meningkat, dikarenakan bertambahnya jumlah wisatawan akan menyebabkan peningkatan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan daerah sektor pariwisata.

2. Variabel jumlah restoran dan rumah makan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan daerah sektor pariwisata pada beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Semakin banyak jumlah restoran dan rumah makan, maka pendapatan daerah dari sektor pariwisata juga akan meningkat. Sebab, semakin bertambah jumlah restoran dan rumah makan maka akan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah sektor pariwisata.
3. Variabel jumlah kamar hotel memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pendapatan daerah sektor pariwisata pada beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Semakin bertambahnya jumlah kamar hotel yang terdapat di wilayah tersebut, maka akan meningkatkan jumlah pendapatan daerah pada sektor pariwisata, diimbangi dengan jumlah wisatawan yang meningkat pula.
4. Variabel jumlah kendaraan bermotor umum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan daerah sektor pariwisata pada beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Semakin banyak atau bertambahnya jumlah

kendaraan bermotor umum, maka akan meningkatkan jumlah pendapatan daerah sektor pariwisata. Hal tersebut dikarenakan, apabila jumlah kendaraan bermotor umum bertambah maka akan memberikan kemudahan akses para wisatawan untuk mengunjungi suatu obyek, sehingga kendaraan bermotor umum dapat memberikan kontribusi yang relatif besar bagi pendapatan daerah sektor pariwisata.

5. Variabel PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan daerah sektor pariwisata pada beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Semakin bertambah nilai PDRB, maka pendapatan daerah sektor pariwisata juga akan meningkat. PDRB juga dapat menjadi bahan acuan dalam mengevaluasi dan merencanakan pembangunan regional, khususnya di Provinsi Jawa Barat.

Saran

1. Penulis memberikan saran kepada pemerintah agar setiap daerah berlaku tertib untuk melakukan sensus ataupun memberikan data yang *up to date* agar segala keperluan yang berkaitan dengan perekonomian, khususnya dalam hal ini pendapatan asli daerah sektor pariwisata dapat berjalan dengan baik. Sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi untuk pembangunan yang berkelanjutan.
2. Dengan dimilikinya potensi pariwisata Jawa Barat yang amat sangat banyak, maka hendaknya pemerintah daerah memperhatikan sarana dan prasarana

akomodasi dan melakukan berbagai promosi, sehingga dapat menarik para wisatawan untuk berkunjung ke Jawa Barat.

3. Pemerintah daerah hendaknya harus bisa mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata yang berasal dari retribusi, pajak hotel, restoran, serta pajak hiburan, sehingga pendapatan daerah sektor pariwisata dapat benar-benar memberikan kontribusi yang baik untuk daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Austriana, I. (2005). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Daerah dari Sektor Pariwisata. *Disertasi Tidak Dipublikasikan, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro*.
- Badrudin, R. (2001). Menggali Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Istimewa Yogyakarta Melalui Pengembangan Industri Pariwisata. *Jurnal Kompak*, Nomor 3, Halaman 384-403.
- Baltagi, B. H. (2005). *Econometric Analysis of Panel Data, 3rd ed.* Chichester: John Wiley & Sons Ltd.
- Basuki, A. T. (2014). *ELECTRONIC DATA PROCESSING (SPSS 15 dan EVIEWS 7)*. Yogyakarta: Danisa Media.
- Ghozali, I. (2001). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: BP Undip.
- Gujarati, D. (2012). *Dasar-dasar Ekonometrika, Terjemahan Mangunsong, R.C.* Jakarta: Salemba Empat.
- Gujarati, D. N. (1995). *Basic Econometrics. Third Edition*. Singapore: Mc. Graw-Hill.
- Halim, A. (2004). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

- Insukrindo. (2003). *Modul Ekonometrika Dasar*. Yogyakarta: FE UGM.
- Kadajtmiko. (2002). *Dinamika Sumber Keuangan bagi Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung.
- Kamila, A. (2016). Pengaruh Sektor Pariwisata, PDRB, Tingkat Investasi dan Jumlah Penduduk terhadap Peningkatan PAD. *Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta* .
- Lundberg, D. E. (1997). *Ekonomi Pariwisata*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Novitri, Q. (2014). Determinan Penerimaan Daerah dari Sektor Pariwisata di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah* , Vol. 1 No. 3.
- Qodarrochman, N. (2010). Analisis Penerimaan Daerah dari Sektor Pariwisata Di Kota Semarang. *Skripsi Universitas Diponegoro* .
- Rosadi, D. (2012). *Ekonometrika dan Analisis Runtun Waktu Terapan dengan Eviews*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Saleh, A. H. (2003). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD): Studi Kasus Terhadap Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.
- Santoso, G. (2005). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia.
- Siagian, A. (1985). *Pajak Daerah Sebagai Sumber Keuangan Daerah*. Jakarta: Institut Ilmu Pemerintah.
- Spillane, J. J. (2002). *Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Spillane, J. J. (1987). *Pariwisata Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Widarjono, A. (2009). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya. Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Widarjono, A. (2007). *Ekonometrika Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis, Edisi Kedua, Cetakan Kesatu*. Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi UII.
- Yani, A. (2008). *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Yoeti, O. A. (2008). *Ekonomi Pariwisata: Introduksi, Informasi, dan Implementasi*. Jakarta: Kompas.

Yuliadi, I. (2013). Determinan Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta* .

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat